

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Banyak ahli sudah menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan. Menurut para ahli, kata "daya" ialah dasar dari kata tersebut dan ketika diberi awalan "ber", artinya ialah memiliki kekuatan. Kekuatan sama dengan tenang, sehingga berdaya bermakna memiliki tenaga ataupun kekuatan.

Dari penjelasan tersebut, pemberdayaan bisa diartikan sebagai usaha untuk membuat objek memiliki tenaga ataupun kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata Inggris "empowerment". Menurut Merriam Webster dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, empowerment memiliki dua makna yakni:¹

- 1) *To give ability or enable to*, yang bermakna memberi kemampuan ataupun cakap untuk menjalankan sesuatu
- 2) *To give power authority to*, yang bermakna memberi kewenangan/kekuasaan.

Dengan semakin diakui jika manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, maka konsep pemberdayaan bukanlah hal baru tetapi telah sering dibicarakan. Karena pentingnya peran manusia dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat itu sendiri. Menurut Wasistono, pemberdayaan diartikan sebagai melepaskan seseorang dari kendali yang ketat dan memberikan kebebasan kepada individu untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka.”

Menurut para ahli lain, pemberdayaan termasuk arti dari "empowerment" yang pada dasarnya membantu klien “untuk memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka, dengan

¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012).

mengurangi hambatan pribadi dan sosial yang menghalangi tindakan mereka. Proses ini dijalankan dengan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri klien untuk memakai daya yang dimilikinya, dengan cara seperti mentransfer kekuasaan dari lingkungan sekitarnya”.

b. Pengertian Masyarakat

Para ahli ilmu kemasyarakatan telah banyak mengemukakan definisi masyarakat. Menurut mereka, masyarakat terdiri dari sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif sama, dan relatif independen dengan orang di luar wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang berinteraksi dalam wilayah tertentu dan memiliki budaya yang sama.

Dari pengertian-pengertian masyarakat yang disampaikan oleh para ahli tersebut, bisa ditarik kesimpulan jika masyarakat ialah kelompok individu yang memiliki tujuan bersama, budaya, dan lembaga khas. Masyarakat juga bisa dianggap sebagai kelompok orang yang terorganisir karena memiliki tujuan yang sama.

Menurut Adam Smith, masyarakat bisa terdiri dari berbagai jenis manusia yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masyarakat terbentuk dan dipandang dari segi fungsi, bukan dari rasa suka ataupun cinta. Dalam masyarakat, orang saling menjaga agar tidak saling menyakit.²

Menurut Linton, masyarakat ialah sekelompok manusia yang sudah lama hidup dan bekerja sama, sehingga terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu di dalamnya. Setiap individu di dalam masyarakat bisa mengatur diri sendiri dan memikirkan dirinya sebagai bagian dari kesatuan sosial yang memiliki batasan tertentu.

M.J. Heskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang mengatur dan mengorganisasi cara hidup tertentu. S.R. Steinmentz menjelaskan jika masyarakat ialah kelompok manusia terbesar yang terdiri dari pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil dan memiliki hubungan erat serta teratur.

² Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2.

Menurut Max Weber, masyarakat ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Emile Durkheim mengatakan jika masyarakat ialah kenyataan objektif individu-individu yang menjadi anggotanya. Sedangkan Karl Marx memberikan definisi masyarakat sebagai struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antar kelompok secara ekonomis.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, terdapat tiga pengertian mengenai masyarakat.

- 1) Pertama, masyarakat patembayan merujuk pada kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan rasional, sedangkan *gemain-scrat* ataupun masyarakat paguyuban merujuk pada kelompok sosial yang berdasarkan naluri kekeluargaan.
- 2) Kedua, masyarakat merujuk pada keseluruhan manusia dalam kehidupan bersama.
- 3) Ketiga, masyarakat merujuk pada suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan identitas ataupun otonomi yang relatif, seperti masyarakat barat ataupun masyarakat primitif.

Jika diartikan sebagai komunitas, Wilkinson mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa. Menurut Thomas Hobbes, masyarakat ataupun komunitas termasuk proses alami di mana orang-orang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, sehingga kepentingan diri pribadi bisa ditemukan dalam kelompok tersebut.

Karakteristik masyarakat ialah seperti berikut:³

- 1) Aglomerasi unit biologis yang memungkinkan anggotanya untuk bereproduksi dan beraktivitas.
- 2) Memiliki daerah tertentu.
- 3) Mampu berkomunikasi.
- 4) Ada diskriminasi antara penduduk dan bukan penduduk.
- 5) Bersama-sama menghadapi ataupun menghindari musuh.

³ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 4.

Dalam kenyataannya, pengertian masyarakat memiliki perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya karena adanya evolusi ataupun perkembangan yang berlangsung lambat. Terdapat beberapa tipe kelompok masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan tahap evolusinya.

Meski begitu, berbagai tipe masyarakat ini memiliki beberapa kesamaan, seperti kesediaan untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Namun, umumnya warga masyarakat enggan memberikan bantuan kepada anggota yang hidup tidak sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Mekanisme ini sudah terlembaga dengan baik dalam masyarakat..

c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Subejo dan Supriyanto berpendapat jika pemberdayaan masyarakat ialah suatu tindakan yang sengaja dijalankan untuk membantu masyarakat setempat dalam merencanakan, memutuskan, serta mengelola sumber daya lokal melalui kegiatan yang dijalankan bersama-sama sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Proses pemberdayaan masyarakat tidak bisa dicapai dengan cepat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dwidjowijoto menjelaskan jika pemberdayaan masyarakat memiliki dua arti, yakni:⁴

- 1) Memberikan wewenang, memindahkan kekuasaan, ataupun delegasi otoritas kepada pihak lain.
- 2) Upaya untuk memberikan kemampuan ataupun kekuatan.

Pihak lain yang dimaksud tidak hanya pada satu orang, tetapi juga pada kelompok orang. Pemberdayaan ialah suatu proses yang holistik, yakni suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, memberikan berbagai kemudahan, serta kesempatan untuk mencapai akses ke sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan

⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Budi Utama: Yogyakarta, 2017). 23.

tindakan untuk memperkuat lembaga, baik lembaga masyarakat desa, ataupun lembaga fungsional, lembaga ekonomi yang ada di desa. Lembaga yang sehat dan kuat menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena melalui lembaga, proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat.

Konteks pemberdayaan mencakup partisipasi, yakni bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan berhak menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan memperhatikan pengakuan subjek akan kemampuan ataupun kekuatan (power) yang dimiliki objek. Secara keseluruhan, proses ini melihat pentingnya mengalihkan individu yang sebelumnya ialah objek menjadi subjek.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Keadilan sosial menjadi prinsip penting dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Keadilan sosial (social justice) bekerja saling melengkapi dengan perspektif ekologi. Keduanya sesungguhnya tidak bisa saling dipisahkan. Keadilan sosial tidak lengkap tanpa adanya perlindungan terhadap kelestarian ekologi (perspektif ekologis). Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat.

Term keadilan sosial sering digunakan dalam berbagai makna. Dalam kerangka pengembangan masyarakat, term keadilan sosial dibangun di atas enam prinsip yaitu: ketimpangan (*structural disadvantage*), pemberdayaan (*empowerment*), kebutuhan (*needs*), hak asasi manusia (*human rights*), perdamaian tanpa kekerasan (*peace non-violence*) dan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*).⁵

1) Ketimpangan Struktural

Teori keadilan yang dikonsepsikan oleh John Rawls (1972) biasanya menjadi starting point (titik berangkat) dalam diskusi tentang keadilan sosial. Dia menyimpulkan, ada beberapa prinsip yang menjadi kriteria sebuah keadilan. Pertama, persamaan dalam

⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta; Kencana, 2013), 18-29.

kebebasan-kebebasan dasar. Kedua, persamaan kesempatan untuk maju. Ketiga, diskriminasi positif bagi rakyat jelata untuk memastikan persamaan. Ketiga prinsip ini dalam perkembangannya dirasakan belum memadai dalam merespon semua problem sosial dan isu sosial yang muncul di era kontemporer. Oleh karena itu, Taylor Gooby dan Dale membangun beberapa perspektif dalam membahas isu-isu sosial, yang meliputi: perspektif individual, reformis struktural, struktural dan sesuai dengan perkembangan literatur terbaru bisa ditambahkan dengan perspektif post struktural.

Dengan perspektif individual, masalah-masalah sosial dilihat sebagai masalah individu. Oleh sebab itu, perlu diupayakan solusi-solusi yang berbasis individual. Misalnya: kemiskinan, kejahatan, bunuh diri, depresi dan pengangguran dilihat sebagai akibat dari pengaruh penyakit (baik psikologis, biologis atau moral) dalam diri individu. Solusi yang dilakukan berpijak pada terapi atau pengobatan secara individual seperti bimbingan, nasihat moral, hukuman, pengobatan medis atau penyesuaian perilaku.

Dengan perspektif reformis institutional, problem sosial ditempatkan dalam struktur kelembagaan dari sebuah tatanan masyarakat. Dengan demikian, kurang memadainya sistem (peradilan, kepolisian dan penjara dan lain-lain) dilihat sebagai penyumbang terjadi masalah kejahatan dan penyimpangan. Tidak memadainya atau tidak efektifnya sistem jaminan sosial dianggap telah mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial itu adalah dengan melakukan perbaikan, penguatan dan pengembangan kelembagaan seperti rumah sakit, sekolah, lembaga peradilan, klinik, kantor sosial, lembaga amal dan pelayanan bagi para pengangguran.

Adapun perspektif struktural melihat problem sosial bersumber dari struktur sosial yang timpang dan menindas. Pendekatan ini cenderung menyalahkan sistem yang melanggengkan budaya patriarki, kapitalisme, rasisme kelembagaan, ketidak-adilan pembagian income dan lain-lain. Sistem yang

bercorak demikian diidentifikasi telah menyebabkan terjadinya penindasan dan ketidak-adilan struktural. Oleh karena itu, resep mereka untuk memecahkan masalah sosial dan membuat perubahan adalah melakukan penataan kembali struktur masyarakat seperti kelas sosial, ras maupun gender.

Perspektif yang terakhir adalah pos-strukturalis. Menurut mereka, problem muncul akibat penggunaan bahasa, pemilihan makna, pembentukan dan akumulasi pengetahuan dan berbagai cara yang digunakan untuk mengontrol dan mendominasi melalui penentuan konformitas (kecocokan), perbuatan yang pantas dan lain-lain. Perspektif ini menolak pemahaman bahwa realitas adalah obyektif dan pasti sebagaimana dianut oleh kebanyakan penganut perspektif struktural. Perspektif post struktural menyalahkan wacana yang dipakai oleh perspektif struktural. Perspektif ini kurang peduli dengan pemecahan masalah. Akan tetapi, ia cenderung mengarah pada upaya mendefinisikan kembali wacana, melakukan pemahaman dengan sharing pengetahuan dan makna-makna, membolehkan orang-orang mengakses wacana dan pemahaman serta melakukan pemahaman dalam rangka mencari titik-titik kelemahan pada aturan-aturan pokok berwacana yang mungkin telah dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

2) Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang

bersifat “*peoplecentered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

3) Kebutuhan

Ada dua cara yang perlu dilihat sebagai dasar bagi keadilan sosial dan pengembangan masyarakat. Pertama, adanya sebuah keyakinan bahwa orang atau masyarakat menginginkan agar kebutuhankebutuhannya dapat terpenuhi. Kedua, orang atau masyarakatnya seharusnya bisa menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan positivis tradisional, kebutuhan dianggap sebagai realitas obyektif, bebas nilai dan diukur. Dengan demikian, “*need assessment* (pengukuran kebutuhan) dianggap sebagai teknis yang sudah teruji secara metodologis dalam mengukur sebuah kebutuhan. Berdasarkan pada metodologi dan keahlian teknis, kebutuhan masyarakat pada suatu situasi hanya bisa diukur dan ditentukan secara memadai oleh para ahli yang trampil dalam menggunakan metodologi *need assessment*. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan tidak dilakukan oleh warga masyarakat yang memiliki kebutuhan dan diletakkan di tangan para penentu kebutuhan yang profesional seperti pekerja sosial, peneliti sosial, ahli psikologi dan lain-lain.

Dengan perspektif ini, Bradshaw membagi kebutuhan menjadi empat. Pertama, kebutuhan normatif (*normative need*), yaitu kebutuhan yang dirumuskan oleh para penguasa, sesuai dengan standar yang diterima (seperti batas-batas kemiskinan). Kedua, kebutuhan yang dirasakan (*felt need*), yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang mau menaruh perhatian. Kebutuhan ini diuji misalnya,

melalui survei sosial. Ketiga, kebutuhan yang diungkapkan (*expressed need*), yaitu kebutuhan yang diungkapkan oleh orang-orang yang mencari berbagai bentuk pelayanan (diuji melalui pengamatan daftar tunggu, pesanan pelayanan dan lain-lain). Keempat, kebutuhan komparatif (*comparative need*), yaitu kebutuhan yang merujuk pada perbandingan pemenuhan layanan dengan ukuran nasional atau regional. Pembagian kebutuhan menurut Bradshaw ini didasarkan pada perumusan kebutuhan yang dibuat oleh para ahli dan konsepsinya tentang kebutuhan secara esensial masih berada dalam kerangka positivistic

Beberapa ahli menolak perspektif positivis tradisional ini. Illich menganggap perspektif itu dibangun karena meningkatnya kekuatan kaum profesional. Perspektif ini membawa konsekuensi pada melemahnya kekuatan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, perspektif profesional ini bersifat konvensional karena didasarkan pada asumsi bahwa ketidak-berdayaan masyarakat cenderung memperlemah kondisi yang telah ditindas serta tidak mengakui hak masyarakat untuk menentukan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kebutuhan bukan bebas nilai dan obyektif. Alangkah baiknya, kebutuhan dipahami dalam perspektif yang menggunakan perhitungan nilai-nilai, ideologi dan mengembangkan pemikiran liberasi bukan penindasan

4) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah mendasar dalam setiap memahami keadilan sosial. Dalam memahami HAM, terdapat kontroversial antara pandangan universalistik dan relativistik. Pandangan pertama, yang di anut oleh negara-negara Barat dan organisasi nonpemerintah seperti Badan Amnesti Internasional menekankan bahwa HAM itu bersifat universal dan absolut. Oleh karena itu, HAM dapat dan harus diterapkan di seluruh masyarakat dan lingkungan tanpa pandang bulu.

Pandangan kedua, yang dianut oleh sebagian negara Asia menekankan bahwa HAM harus dipahami

dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, HAM bersifat relatif. Sementara pemahaman HAM yang dominan sejauh ini esensinya hanya mewakili konsepsi kalangan Barat. Pandangan HAM yang universalistik ini dikritik sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang opresif.

Namun dalam konteks pengembangan masyarakat, pandangan HAM yang universalistik lebih berguna dalam menyediakan kerangka kerja dalam yang sesuai dengan perspektif keadilan sosial. HAM universalistik ini berdasarkan Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang isinya berupa pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebebasan, hak persamaan di mata hukum, hak bebas dari ketakutan, bebas berorganisasi, perlindungan terhadap diskriminasi dan lain-lain. Ada juga dua perjanjian internasional PBB yang mengakui hak-hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja, hak mendapatkan pendapatan memadai, hak untuk berpendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pakaian dan perumahan, hak untuk bergabung dalam organisasi dan lain-lain. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia dan bisa dimintai pertanggung-jawaban jika tidak melaksanakannya. Beberapa pernyataan dalam dokumen ini memiliki implikasi signifikan dan bisa digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai legitimasi terhadap program-program pemberdayaan.

Perlu dijelaskan bahwa hak asasi berhubungan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban. Hal ini berjalan dalam dua level: hal yang paling mendasar bahwa kewajiban terhadap orang lain mengikuti hak-hak asasi orang tersebut. Dengan demikian, ada sebuah pernyataan bahwa orang memiliki hak untuk bebas berbicara dengan implikasi bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk tidak menolak hak orang berbicara bebas. Di sini, ada pernyataan tentang hak asasi yang menekankan beberapa pembatasan terhadap kebebasan terhadap orang lain. Masalah ini penting bagi kerja kemasyarakatan, di mana hak dan tanggung

jawab sangatlah penting, yang keduanya berhubungan erat.

Dalam perspektif keadilan sosial, upaya mengembangkan hak-hak asasi masyarakat lapis bawah menuntut tiga pendekatan yang saling berkaitan. Pertama, mereka harus dibantu untuk mengetahui hak-haknya. Kedua, mereka harus dibantu untuk menuntut dan menentukan hak-hak-haknya. Ketiga, mereka harus dibantu untuk mewujudkan dan menggunakan hak-haknya. Ketiga pendekatan ini menjadi model yang relevan untuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

5) Perdamaian Tanpa Kekerasan

Perdamaian secara sederhana adalah tidak adanya perang. Perdamaian dalam pengertian luas mencakup konotasi lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pribadi seperti ketiadaan stres dan konflik. Seperti perdamaian, kekerasan bisa dipahami pada level sederhana (kekerasan fisik oleh perorangan dan kelompok). K

emungkinan ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan jika tujuan yang diinginkan oleh masyarakat secara universal untuk hidup damai dan tidak ada kekerasan belum terwujud. Pertama, masih adanya hambatan-hambatan struktural, kuatnya vested interest (kepentingan pribadi) dari pihak-pihak yang menentang perdamaian. Kedua, metodologi yang dipakai dalam mewujudkan perdamaian tidak memadai dan tidak cocok. Dalam kasus perdamaian dan tidak adanya kekerasan, jelas-jelas masih ada berbagai keinginan dan struktur sosial yang menentang keras upaya perdamaian, misalnya karena paham nasionalisme, sektarianisme, perlindungan kepada keistimewaan yang dimiliki dan ketidakadilan global, patriarkhi, kolonialisme, keuntungan, perdagangan senjata dan lain-lain..

Perspektif non kekerasan, selain menyarankan penggunaan metode konvensional dalam menciptakan perdamaian, juga menyarankan agenda perubahan sosial dalam menciptakan perdamaian.

6) Demokrasi Partisipatif

Demokrasi secara mendasar berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara umum demokrasi dapat diklasifikasi ada dua kelompok: demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatori. Dalam demokrasi perwakilan, masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, sementara dalam demokrasi perwakilan, peran masyarakat adalah memilih orang-orang (biasanya melalui pemilihan umum) yang kemudian dipercaya untuk membuat keputusan atas nama mereka.

Bentuk demokrasi perwakilan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan pada masyarakat besar, kompleks dan sentralis seperti masyarakat Barat modern. Mereka cenderung menerima demokrasi perwakilan sebagai bentuk demokrasi yang normal dan jarang mempertanyakannya. Namun pada tingkatan pemerintahan lokal, di mana model partisipatori menjadi lebih mungkin akan membuka jalan bagi upaya-upaya pengembangan alternatif berdemokrasi secara partisipatori.

Dalam hal ini, sebuah langkah yang mengarah pada model demokrasi partisipatori adakah sebuah komponen penting dalam strategi keadilan sosial. Ada empat ciri utama pendekatan demokrasi partisipatori yang penting untuk pengembangan masyarakat.

Upaya menumbuhkan partisipasi warga melalui program pengembangan masyarakat diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk hidup secara lebih bermutu, adanya realitas kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta perlunya tindakan konkrit dalam mengupayakan perbaikan kehidupan.

Partisipasi yang ingin dibangun melalui program pengembangan masyarakat berjalan secara bertahap, dimulai dari jenis partisipasi interaktif menuju tumbuhnya mobilitas sendiri (self mobilization) di kalangan warga. Partisipasi interaktif (interactive participation) adalah bentuk partisipasi masyarakat di mana ide dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program masih

dibantu dan difasilitasi oleh pihak luar atau para aktivis LSM. Sementara itu, mobilitas sendiri adalah bentuk partisipasi di mana masyarakat mengambil inisiatif, melaksanakan kegiatan pada berbagai tahap secara mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

Kegiatan pengembangan masyarakat tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi atas nama (taken participation), partisipasi pasif (passive participation), partisipasi lewat konsultasi (participation by consultation) partisipasi untuk insentif material (participation for material incentive) ataupun partisipasi fungsional (functional participation). Partisipasi atas nama adalah partisipasi yang manipulatif di mana masyarakat hanya di atasnamakan melalui misalnya tokoh-tokoh formal atau pertemuan satu arah. Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi di mana masyarakat dilibatkan sebagai massa, peserta atau partisipan dari suatu kegiatan. Partisipasi lewat konsultasi adalah bentuk partisipasi yang menjadikan masyarakat sebagai subyek konsultasi dari ide kegiatan tertentu. Keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan bukan oleh masyarakat tetapi oleh pelaksana. Partisipasi untuk insentif material adalah partisipasi masyarakat karena adanya insentif material yang disediakan. Adapun partisipasi fungsional adalah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di mana persyaratan dan kondisi-kondisinya telah ditetapkan dalam suatu kerangka kerja atau kontrak.

e. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat wajib mengikuti pendekatan sebagaimana berikut:⁶

- 1) Pertama-tama, upaya yang dijalankan haruslah terfokus. Hal ini juga dikenal dengan istilah pemihakan. Upaya tersebut harus langsung ditujukan kepada orang yang memerlukannya, melalui program yang sudah dirancang secara khusus untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.

⁶ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 25.

- 2) Kedua, program tersebut harus melibatkan dan bahkan dijalankan langsung oleh masyarakat yang menjadi target. Melibatkan masyarakat yang akan dibantu memiliki beberapa tujuan, seperti agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan memahami kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, dengan melibatkan mereka, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas upaya peningkatan diri dan ekonomi mereka.
- 3) Ketiga, memakai pendekatan kelompok, karena masyarakat miskin sulit untuk menyelesaikan masalah mereka secara sendirian. Selain itu, penanganan secara individu akan membuat ruang lingkup bantuan menjadi terlalu luas. Pendekatan kelompok ini lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

Praseto dan Maisaroh memperlihatkan jika mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang produktif dan kreatif termasuk strategi dasar dalam kebijakan pemberdayaan, yang bisa dijalankan dalam jangka pendek. Namun, jika strategi tersebut dikelola secara berkelanjutan, dampaknya akan lebih besar dan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam jangka panjang.

Baiquni mengusulkan konsep dasar pemanfaatan sumber daya sebagai langkah guna memberi peningkatan kesejahteraan penduduk di pedesaan. Terdapat lima pilar dalam konsep tersebut, yakni partisipasi lokal dalam memanfaatkan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas melalui perbaikan regenerasi sumber daya, meningkatkan kesejahteraan yang adil, peningkatan kualitas hidup dan pengetahuan lokal, serta memperhatikan kemampuan daya dukung sumber daya pedesaan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep tersebut, kesejahteraan penduduk pedesaan bisa diwujudkan:

- 1) Mendukung kehidupan penduduk di pedesaan dengan mengelola sumberdaya pedesaan secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan

masyarakat dan institusi terkait, dengan memanfaatkan sumberdaya pedesaan.

3) Memahami potensi dan masalah sumberdaya pedesaan,

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan ataupun perkotaan tak bisa terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan proses pengentasan kemiskinan di daerah tersebut berjalan lambat, seperti sektor ekonomi, keuangan, kelembagaan, dan sosial. Hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target Millenium Development Goals yang menyangkut pengentasan kemiskinan pada tahun 2015. Untuk mencapai target pengurangan kemiskinan, strategi yang bisa dijalankan ialah dengan memperkuat keterkaitan antara sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa.

f. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi ialah metode untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga, dana, daya, dan peralatan, guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses pengembangan dan penguatan kemampuan masyarakat agar mereka bisa terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Hal ini dijalankan agar masyarakat bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi serta mampu membuat keputusan secara mandiri dan bebas. Hikmat menjelaskan jika ada beberapa faktor internal yang bisa menghambat pemberdayaan, seperti kurangnya rasa saling percaya, kurangnya daya inovasi ataupun kreativitas, mudah menyerah ataupun putus asa, rendahnya aspirasi dan cita-cita, tidak mampu menunda kepuasan, wawasan waktu yang sempit, kecenderungan pada kelompok keluarga, ketergantungan pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat tinggal, serta ketidakmampuan ataupun ketidaksediaan untuk memosisikan diri sebagai orang lain.

Cara untuk memberdayakan masyarakat ialah dengan mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat sangat penting dan mengedepankan masyarakat lokal yang mandiri untuk mengatur diri sendiri. Tujuan dari pendekatan pemberdayaan ialah untuk memberikan peran kepada individu sebagai pelaku yang

menentukan hidupnya dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki.

Proses pemberdayaan dimulai dengan memandirikan masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Sasaran utama dari pemberdayaan ialah masyarakat miskin dan perempuan harus terlibat secara aktif dalam prosesnya. Tim fasilitator yang beragam disiplin ilmu harus turut mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Peran utama dari tim pemberdayaan ialah mendampingi masyarakat pada awal proses dan berkurang seiring dengan kemampuan mandiri masyarakat. Pemberdayaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan.⁷

- 1) Tahap awal dalam pemilihan lokasi ialah menjalankan seleksi wilayah berdasarkan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak terkait, dan masyarakat. Kriteria ini sangat penting agar tujuan lembaga dalam memajukan masyarakat bisa tercapai dengan baik dan lokasi yang dipilih bisa dijamin kualitasnya.
- 2) Tahap selanjutnya ialah sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang termasuk kegiatan penting untuk membangun komunikasi dan dialog dengan masyarakat. Sosialisasi ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait mengenai program pemberdayaan masyarakat. Proses sosialisasi sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
- 3) Tahap terakhir ialah proses pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kegiatan.:
 - a) Penelitian partisipatif tentang keadaan pedesaan,
 - b) Pengembangan kelompok masyarakat,
 - c) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan, dan
 - d) Monitoring dan evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat ialah meningkatkan kemampuan dan kemandirian

⁷ Puji Hadiyanti, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur”, *Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 17, No. IX, (2008): 92-93.

masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam proses ini, masyarakat bekerja bersama untuk:

- a) mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, potensi, dan peluang di desa;
- b) merencanakan kegiatan kelompok berdasarkan penelitian;
- c) melaksanakan rencana kegiatan kelompok; dan
- d) memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus [Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP)].

Dalam segala jenis kegiatan, seringkali dipergunakan teknik dan alat visualisasi untuk mendukung diskusi antara masyarakat dan mempermudah proses pemberdayaan. Diharapkan dengan penggunaan teknik-teknik tersebut, proses kajian, penyusunan rencana kegiatan, penerapan, monitoring, dan evaluasi bisa dijalankan secara sistematis. Salah satu teknik kajian yang umum dipergunakan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA). Monitoring dan evaluasi menjadi tahap yang sangat penting dalam rangka memperbaiki proses secara terus-menerus agar tujuan bisa tercapai. Aspek yang harus dimonitor dan dievaluasi meliputi proses, pencapaian, dan dampak proses pemberdayaan.

- 4) Tahap keempat dari pemberdayaan masyarakat ialah pemandirian masyarakat. Proses ini termasuk pembelajaran yang terus-menerus untuk memberikan kemandirian pada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam arti ini, peran tim pemberdayaan masyarakat akan semakin berkurang dan akhirnya dihentikan. Fasilitator dalam kelompok akan digantikan oleh pengurus kelompok ataupun pihak lain yang dipercayai masyarakat. Durasi pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipastikan karena ini ialah proses yang berkelanjutan dan memerlukan waktu serta tidak bisa dijalankan secara tergesa-gesa.

g. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam

Masyarakat Muslim adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal usul suku bangsa dan perbedaan agama. Masyarakat Muslim merupakan

kelompok manusia yang bekerja sama dan hidup bersama berasaskan prinsip Al Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupannya.

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Bukanlah disebut masyarakat Islam apabila selalu diliputi perasaan dendam, yang muncul akibat kezaliman sosial dan perlakuan buruk sebagian orang terhadap sebagian yang lainnya. Bentuk interaksi seperti ini tidak diakui keberadaannya dalam Islam.

Karakteristik masyarakat Muslim adalah masyarakat yang memiliki sifat-sifat positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Setiap anggota masyarakatnya memainkan peran masing-masing untuk membangun masyarakat secara harmonis dengan mencerminkan kerukunan. Kedamaian dan kerukunan menjadi karakteristik utama dari masyarakat yang bercorak Islami.⁸

Penggunaan konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw dalam masyarakat. Beliau telah memberikan contoh mengenai prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi. Pemerintahan Rasulullah saw telah menerapkan sikap toleran yang hakiki dengan prinsip menghargai etos kerja dan saling tolong-menolong (ta'awun) bagi semua warga negara dalam melaksanakan ajaran agama. Dengan adanya kesempatan dan persamaan dalam berusaha, maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara individu satu dengan yang lain. Prinsip-prinsip ini saling terkait erat dan akan dijelaskan secara spesifik berikut ini.⁹

⁸ Muhammad Hatta, "Al-Qur'an dan Karakteristik Masyarakat Muslim", *Jurnal Keislaman*, Vol. 3, No. 2 TT, 148-158

⁹ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 2 (2016). 201-206

1) Prinsip Keadilan

Penggunaan kata keadilan dalam al-Qur'an berada pada urutan ketiga terbanyak setelah kata Allah dan 'Ilm, memperlihatkan pentingnya nilai dasar ini dalam Islam. Keadilan memiliki arti kebebasan bersyarat dalam akhlak Islam, yang jika diterapkan tanpa batasan, bisa mengganggu tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Firman Allah dalam Surah Al-Hadid Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia bisa melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa*”.

Keadilan sosial dalam masyarakat Muslim berlaku bagi semua orang, tanpa memandang agama, ras, bahasa, dan warna kulit. Hal ini termasuk titik puncak dari keadilan yang belum tercapai oleh hukum internasional ataupun regulasi sampai saat ini. Apabila setiap masyarakat Muslim yang hidup di dunia ini bisa menerapkan keadilan, maka mereka tidak akan merasa khawatir ataupun tertindas oleh orang-orang yang lebih beruntung.

2) Prinsip Persamaan

Prinsip kesetaraan ialah prinsip yang didasarkan pada keyakinan yang sama tentang keadilan. Dalam Islam, setiap individu diperlakukan secara individual dan bukan sebagai bagian dari komunitas yang tinggal di negara yang sama. Semua manusia, dengan perbedaan mereka, ialah hamba Allah dan tidak ada perbedaan dalam kedudukan, hak, dan kewajiban mereka sebagai manusia. Bahkan kebutuhan dasar setiap orang diatur dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam prinsip kesetaraan, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dalam hal asal-usul dan penciptaan. Perbedaan hanya dalam kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan kebutuhan pekerjaan serta perbedaan profesi. Islam tidak memperhitungkan status sosial sebagai perbedaan, karena yang membedakan ialah ketinggian derajat ketaqwaan seseorang kepada Allah. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya.

3) Prinsip Partisipasi

Partisipasi dianggap sebagai elemen penting dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan interaktif. Prinsip partisipasi melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungan. Kontribusi sukarela masyarakat dalam partisipasi menciptakan rasa harga diri dan meningkatkan harkat serta martabat, yang selanjutnya memperluas penyediaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan masyarakat.

Di zaman Rasulullah, masyarakat telah diajarkan untuk membangun negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang dianggap ideal. Masyarakat yang berasaskan prinsip moral ini memperoleh tatanan sosial yang baik dan seimbang antara hak individu dan hak sosial. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam juga mengembangkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan secara dinamis,

memecahkan masalah yang dihadapi, dan membuat keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, partisipasi telah ditanamkan dalam masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan memperlihatkan keseimbangan yang baik dalam pemberdayaan masyarakat.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Etos ialah ciri khas dan sikap, kebiasaan dan keyakinan yang khusus bagi individu ataupun kelompok manusia. Istilah "kerja" mencakup segala bentuk praktik ataupun pekerjaan yang memiliki unsur kebaikan dan keberkahan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Etos kerja dalam Islam ialah hasil dari keyakinan seorang Muslim jika pekerjaan terkait dengan tujuan hidupnya, yakni mendapatkan rida Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan jika pada dasarnya, Islam ialah agama amal ataupun kerja, seperti yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسُرُّدُونَ إِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itudan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang sudah kamu kerjakan”

Bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mengembangkan budaya serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, manusia perlu mengaktifkan kemampuan dirinya agar bisa mengenali diri dan posisinya sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa membantu diri sendiri melalui usaha sendiri. Islam tidak memisahkan antara manusia dan eksistensinya sebagai manusia serta pribadinya. Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari nafkah, dan selalu berdaya. Bahkan, Islam

telah menjadikan mencari nafkah sebagai fardhu. Rasulullah saw. juga pernah menyampaikan hal yang sama.:

”Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri.” (HR. Bukhori, No. 2072).

5) Prinsip Tolong Menolong

Tolong-menolong ataupun ta'awun, berasal dari bahasa Arab yang bermakna berbuat baik. Secara istilah, ta'awun ialah perbuatan yang dilandasi hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah SWT. Islam telah memberikan solusi praktis terhadap masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat yang cenderung egois menjadi saling membantu dan bekerja sama dalam membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip persamaan dan keadilan, yang dikenal sebagai prinsip tolong-menolong. Setiap individu menjadi bagian penting dalam masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih luas.

“Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (H.R. Muslim).

Islam mengharuskan orang-orang di sekitar yang mampu untuk membantu mereka yang tidak mampu bekerja. Salah satu bentuk kepedulian ialah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang terberdaya. Bantuan ini bisa diberikan kepada anak-anak mereka, ahli waris mereka, ataupun kepada orang yang terdekat yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka jika tidak ada yang wajib menanggung.

2. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Potensi desa termasuk kemampuan desa yang bisa dikembangkan ataupun dikelola guna memberi peningkatan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat desa. Secara umum potensi desa bisa dibagi menjadi dua

bagian yakni, potensi material seperti iklim, lingkungan geografis, air, tanah, ternak dan SDM (Sumber Daya Manusia), kemudian potensi immaterial yang diwujudkan dalam bentuk komunitas dan bentuknya, pergaulan, lembaga social budaya, lembaga/instansi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan desa, dan aparat desa dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Potensi bisa dijelaskan lebih detail seperti berikut:¹⁰

- 1) Potensi Fisik, yakni termasuk potensi yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam (SDA) di desa yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan, berupa:
 - a) Tanah, tanah bukan hanya sekedar tempat untuk bercocok tanam, tapi juga sebagai sumber mineral dan bahan tambang. Tanah termasuk media untuk tumbuh-tumbuhan tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok untuk tebu, kelapa, dan kacang tanah, sedangkan tanah berkapur cocok untuk jati dan akan menghasilkan kualitas jati yang sangat bagus. Di darat, seperti batu bara, pasir kuarsa, dan batu kapur juga bisa ditambang.
 - b) Tanah memuat beragam kekayaan yang terkandung di dalamnya yang bisa dikelola. Seperti kesuburan tanah, mineral dan berbagai hasil pertambangan.
 - c) Secara umum, mata air memberikan potensi desa sebagai sumber air bersih bagi masyarakat desa. Air diperoleh dari dalam tanah melalui pompa. Air memberikan dukungan bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidup masyarakat dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
 - d) Iklim erat kaitannya dengan suhu dan curah hujan, yang berdampak besar di berbagai wilayah. Pada elevasi tertentu, sebuah desa telah berkembang dikarenakan iklim yang cocok untuk pengembangan dan penggunaan tanaman tertentu. Misalnya perkebunan, tempat istirahat,

¹⁰ Miswar Tumpu dkk, *Pengelolaan Potensi Desa (Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat)*, (Makasar: Tohar Media, 2021). 22-25.

- dan tempat rekreasi dengan begitu iklim sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di desa.
- e) Lingkungan geografi, seperti sumber daya alam, lokasi, luas kawasan, tipe lahan, kesuburan tanah dan tata guna lahan desa sangat mempengaruhi perkembangan desa.
 - f) Peternakan memberikan energy dan nutrisi pada penduduk pedesaan. Di pedesaan, pertanian dan ternak juga bisa dipergunakan sebagai sumber investasi bagi petani dan peternak.
 - g) Manusia ialah sumber energy dalam mengelola kawasan pertanian, peternakan oleh karena itu manusia termasuk efektifitas yang sangat berharga untuk mengelola sumber daya yang ada pada suatu daerah. Taraf pendidikan, tingkat inovasi, kreativitas dan semangat masyarakat termasuk penentu pembangunan desa.
- 2) Potensi Non Fisik, yakni potensi yang terkait dengan penduduk di desa dan seluruh aspek kehidupannya. Potensi non fisik yang lain meliputi kelembagaan, perangkat desa, adat yang turun temurun, kebudayaan dan apatur desa. Komunitas pedesaan yang sudah lama aktif akan membentuk sistem kehidupannya sendiri. Tatanan kehidupan desa dipengaruhi pada kondisi alam di pedesaan. Potensi desa non fisik meliputi:
- a) Masyarakat desa dicirikan memiliki tingkat gotong royong yang tinggi dalam hubungan dengan kerabat, yang termasuk dasar yang kokoh untuk rencana pembangunan berkelanjutan dan kekuatan untuk pembangunan daerah pedesaan.
 - b) Lembaga ataupun organisasi social, yakni termasuk komunitas yang membantu kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan, seperti:
 - a) Kelembagaan di desa, contohnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun Warga), RT (Rukun Tetangga), (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), (KARTAR) Karang Taruna, Lembaga Adat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lain sebagainya.

- b) Kelompok masyarakat untuk konsultasi dan lain-lain.
 - c) Institusi pendidikan, seperti sekolah, rumah baca ataupun perpustakaan.
 - d) Institusi kesehatan, contohnya Posyandu (Kesehatan Terpadu), dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
 - e) Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) desa, contohnya Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Perangkat desa dan aparatur sipil Negara ialah media untuk mendukung kelangsungan dan tertib desa. Berperan penting untuk perubahan dan pembangunan pedesaan. Misalnya: Kepala Desa (Kades).
- Potensi desa fisik dan non fisik termasuk faktor pendukung yang mendukung desa sebagai daerah pedalaman, yakni daerah penghasil pangan pokok bagi masyarakat perkotaan. Sementara itu, pedesaan dibagi menjadi tiga kategori menurut potensinya:
- 1) Daerah Pedesaan yang memiliki potensi besar, medan datar, dan dilengkapi fasilitas irigasi teknis.
 - 2) Wilayah pedesaan yang memiliki potensi sedang, beberapa wilayah yang memiliki lahan pertanian yang subur dan medan yang tidak rata, beberapa di antaranya ialah irigasi teknis dan semi teknis.
 - 3) Daerah pedesaan yang memiliki potensi rendah, daerah pertanian yang tandus, dan medan yang berat (bergunung-gunung).

b. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara garis besar tujuan dikembangkan ataupun pengembangan potensi desa yakni untuk mendorong ataupun meningkatkan taraf kehidupan serta perilaku mandiri masyarakat desa dengan cara mengembangkan potensi kepemimpinan, penguatan sistem dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan khusus dikembangkannya potensi desa ialah:¹¹

- 1) Meningkatkan keikutsertaan penduduk desa dan peran aktifnya secara kritis, bertanggung jawab dan

¹¹ Miswar Tumpu dkk, *Pengelolaan Potensi Desa (Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 25.

demokratis dalam pengambilan keputusan pembangunan pada desa.

- 2) Guna memberi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin, mengembangkan kemampuan usaha dan peluang usaha.
- 3) Membuat dan memaksimalkan fungsi dan peran unit pengelola keuangan dan usaha (UPKU) sebagai instansi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Pembinaan dan pembentukan program kerja masyarakat khususnya dalam hal pengembangan kelembagaan dan usaha.
- 5) Mengelola potensi ekonomi utama pedesaan.
- 6) Mewujudkan keterpaduan peran aktif antara instansi/lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

3. Ekowisata

a. Pengertian Ekowisata

Ekowisata ialah jenis pariwisata alam yang memiliki tujuan berbeda dengan jenis pariwisata alam lainnya. Ekowisata ialah jenis pariwisata yang berkelanjutan secara ekologis karena pariwisata ini fokus pada promosi pendidikan, kesadaran lingkungan, dan warisan kebudayaan ataupun leluhur terkait alam, membantu membiayai konservasi di masa depan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan. Minat ekowisata antara lain meliputi kawasan konservasi dan dilindungi (termasuk taman laut dan taman nasional), keanekaragaman hayati, dan budaya lokal yang ada pada wilayah tertentu.¹²

Fennel menjelaskan jika ekowisata ialah jenis wisata alam yang berkelanjutan dengan fokus pada pengalaman dan pendidikan tentang alam. Pengelolaannya dijalankan dengan sistem tertentu dan tidak memberikan dampak negatif besar pada lingkungan. Selain itu, ekowisata tidak bersifat konsumtif dan lebih berorientasi pada kepentingan lokal. Tempatnya berada di daerah wisata alam dan memberikan kontribusi pada konservasi ataupun preservasi lingkungan.

¹² Rita Parmawati, *Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat*, (Malang: UB Press, 2022). 19.

Menurut The International Ecotourism Society (TIES), ekowisata ialah perjalanan bertanggung jawab yang memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sedangkan pada tahun 1996, World Conservation Union (WCU) memberikan definisi ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis mengunjungi wilayah yang masih asli dan alami untuk menikmati keindahan alam dan kebudayaan lokal. Selain itu, ekowisata juga mempromosikan konservasi, memiliki efek negatif yang minimum, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata..

Menurut Wood, ekowisata ialah suatu bentuk kegiatan wisata yang bertanggungjawab dan didasarkan pada kegiatan wisata alam, yang melibatkan kegiatan wisata pedesaan dan budaya dalam skala kecil, baik bagi pengunjung ataupun pengelola wisata. Berbeda dengan pariwisata konvensional yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan guna memberi peningkatan pendapatan ekonomi, meskipun bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan di lokasi wisata. Ekowisata bisa membantu wisatawan untuk lebih menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, ekowisata diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan.¹³

b. Aspek Dalam Ekowisata

Ekowisata bukan sekadar kegiatan pariwisata, melainkan suatu konsep yang mencerminkan kesadaran terhadap lingkungan dan prinsip kelestarian. Pengembangan ekowisata harus mampu meningkatkan hubungan antarmanusia, kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, di kawasan lindung terutama, pengembangan ekowisata perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh,

¹³ Toni Soetopo, "Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Menghadapi Visiti Indonesia Year 2008", *Komunika*, Vol 10, No. 2 (2007): 86.

beberapa pertimbangan dalam pengelolaan harus benar-benar diperhatikan. Aspek-aspek yang termasuk pertimbangan pengelolaan suatu kawasan ekowisata ialah.¹⁴

- 1) Proses perencanaan, misi dan visi, dari perkembangan suatu kawasan haruslah menjadi hal yang penting. Berangkat dari misi dan visi inilah jalannya suatu pengembangan usaha ekowisata akan menuju kearah yang baik dan berkelanjutan ataupun menuju kepada degradasi lingkungan. Salah satu upaya untuk meminimalisasi dampak ialah dengan membuat zonasi kawasan, sehingga peruntukan kawasan menjadi jelas.
- 2) *Sistem ROC* termasuk suatu metode yang memanfaatkan pembentukan wilayah-wilayah yang berbeda berdasarkan kondisi lingkungan dan sarana-sarana kegiatan pariwisata yang sesuai dengan masing-masing wilayah tersebut. Di samping itu, penggunaan fasilitas yang ramah lingkungan juga menjadi pilihan utama bagi pengembangan kawasan. Untuk itu perlu analisa-analisa: *Transport Networks* (aksesibilitas), *Concentration or Dispersal System* (penyebaran daerah tujuan wisata) serta interkoneksi dan sebaan fragilitas ekosistem), dan model-model perencanaan TPM (Toourism Planning Model) di mana arsitektur lansekap, perencanaan kota dan kampung, ahli teknik lingkungan, ahli ekologi dan sosiologi, transportasi, dan lainnya, bekerja sama.
- 3) Pelibatan multi-stakeholders dalam pengembangan ekowisata mencakup identifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengajak mereka untuk duduk bersama dalam proses perencanaan. Pembangunan kepariwisataan seharusnya melibatkan sector pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan kedudukan dan peran yang setara dan seimbang, agar perencanaan, program, dan implementasi berjalan secara sinergis, komprehensif, multidisiplin, dan multisektoral.
- 4) Proses pengambilan keputusan harus melibatkan semua stakeholders yang terlibat dengan cara

¹⁴ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 387-388.

demokratis dan kompromis. Keputusan yang dihasilkan harus termasuk hasil bersama dari semua pihak yang terlibat.. Model dalam pengambilan keputusan cukup banyak, seperti misalnya Civics Model yang bisa menyediakan proses yang bisa dipertimbangkan oleh setiap institusi, kelompok masyarakat, pengembangan, LSM, untuk menjamin adanya interaksi dan adaptasi usulan-usulan yang akan diputuskan bersama.

- 5) Pengelolaan manajemen risiko, keamanan dan proteksi terhadap konsumen. Adapun aspek yang penting untuk diingat ialah risiko, keamanan, dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan mengenai wilayah yang akan dikembangkan harus lengkap, termasuk jadwal musim, fenomena alam, dan catatan mengenai larangan dari masyarakat setempat. Selain jaminan keamanan bagi pengunjung, estetika dari kawasan pun harus turut pula diperhatikan.
- 6) Pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia termasuk salah satu masalah di dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama yang baik, yang dijalankan oleh pihak industry pariwisata yang melibatkan pihak pemerintah, serta kelompok masyarakat, di dalam rangka pendidikan dan pelatihan sangatlah dibutuhkan. Melalui proses tersebut diharapkan tenaga ekowisata terampil bisa dihasilkan sendiri oleh Indonesia, tidak perlu mendatangkan ahli dari luar negeri.
- 7) Monitoring dan evaluasi. Salah satu hal penting di dalam pengelolaan ialah masalah monitoring dan evaluasi. Seberapa banyak pengusaha pariwisata alam telah menjalankan monitoring dan evaluasi? Diperlukan hal ini agar bisa memahami efek yang ditimbulkan oleh kunjungan ke dalam area, baik efek yang merugikan ataupun menguntungkan (baik dampak negatif ataupun positif). Jika dampak negatifnya tinggi, maka perlu diadakan penurunan dan pemeliharaan kawasan.

4. Hutan Mangrove

a. Pengertian Mangrove

Asal-usul kata Mangrove berasal dari kata mangal yang mengacu pada suatu komunitas tumbuhan. Menurut Supriharyono, Mangrove memiliki dua arti yakni pertama sebagai komunitas ataupun masyarakat tumbuhan ataupun hutan yang tahan terhadap kadar garam ataupun salinitas yang tinggi seperti pada daerah pasang surut air laut, dan kedua sebagai individu spesies. Sedangkan menurut Saparinto, Mangrove memiliki arti sebagai vegetasi hutan yang tumbuh pada pantai karang, pada dataran koral mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir ataupun ditimbuni lumpur ataupun pantai berlumpur.

Mangrove termasuk suatu tempat yang secara perlahan berubah menjadi semi daratan akibat adanya pembentukan tanah lumpur dan daratan secara terus menerus. Meskipun terdapat pengertian yang berbeda-beda, namun Mangrove pada dasarnya termasuk formasi hutan daerah tropika dan subtropika yang terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan Mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan siklus biologi suatu perairan.

Sistem ekosistem mangrove termasuk suatu sistem di alam yang memuat kehidupan dan memperlihatkan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan serta antara makhluk hidup itu sendiri. Sistem ini terletak di daerah pesisir, dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon ataupun semak yang unik dan mampu tumbuh di lingkungan air asin/payau.¹⁵

Dari penjelasan yang disebutkan di atas, hutang mangrove ialah jenis vegetasi yang tumbuh di pantai tropis dan sub-tropis, dengan spesies mangrove yang mendominasi. Vegetasi ini bisa tumbuh dan berkembang di daerah pantai yang terkena pasang surut, lumpur, dan pasir. Namun, tidak semua pantai memiliki mangrove, karena pertumbuhannya memerlukan beberapa persyaratan seperti

¹⁵ Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni, *Hutan mangrove dan Pemanfaatannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017). 2.

pantai yang terlindungi dan tenang, serta menerima sedimen dari muara sungai.

b. Faktor Abiotik dan Biotik Pendukung

Kondisi yang mendukung terbentuknya hutan mangrove bergantung pada faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi keberadaan flora dan fauna serta interaksi antara keduanya. Sementara itu, faktor abiotik menjadi syarat utama terbentuknya hutan mangrove:¹⁶

- 1) Suhu udara
- 2) Substrat lumpur
- 3) Daerah payau
- 4) Arus air laut
- 5) Perlindungan
- 6) Air garam
- 7) Tepi laut yang dangkal.

Flora dan fauna yang hidup di hutan mangrove menjadi faktor biotik yang sangat berpengaruh dalam terbentuknya ekosistem tersebut. Dalam hutan mangrove, terdapat interaksi antar spesies yang sangat kompleks. Faktor biotik ini berinteraksi dengan faktor abiotik seperti iklim dan edafis untuk membentuk suatu ekosistem yang seimbang.

Namun, faktor abiotik utama yang mempengaruhi hutan mangrove ialah iklim seperti suhu, angin, badai, curah hujan dan zona kehidupan. Selain itu, faktor edafis seperti geomorfologi mangrove, salinitas dan faktor edafis lainnya juga memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem hutan mangrove yang digambarkan lebih lanjut dengan deskripsi yang lebih rinci dari elemen-elemen biotik utama yang menyusun ekosistem, yakni flora dan fauna mangrove, hubungan antara mereka serta implikasi pengelolaannya.

c. Ragam Vegetasi Mangrove

Menurut Kitamura Pembagian vegetasi mangrove meliputi tiga jenis, yakni vegetasi utama, vegetasi pendukung, dan vegetasi asosiasi. Pertumbuhan vegetasi hutan selalu mengikuti kondisi habitat yang ada, seperti halnya pada hutan mangrove. Berdasarkan fisiognomi dan

¹⁶ Asihing Kustanti, *Manajemen Hutan Mangrove*, (Bogor: IPB Press, 2011). 6-7.

tingkat perkembangannya vegetasi mangrove dibagi menjadi empat yakni.¹⁷

- 1) Vegetasi Semak termasuk jenis vegetasi yang tumbuh di pantai berlumpur ataupun tepi laut. Vegetasi ini berasal dari spesies-spesies pionir yang memiliki ciri tumbuh dengan kuat, banyak cabang, tunas anakan, membentuk rumpun, rimbun, dan pendek. Komposisi floranya didominasi oleh *Avicennia Marina* dan *Sonneratia caseolaris*.
- 2) Vegetasi Mangrove Muda ditandai dengan tajuk seragam yang terdiri dari spesies seperti *Rhizophora* sp. Meskipun ada spesies pionir lainnya, tumbuhnya vegetasi ini terjadi setelah perkembangan *Avicennia* sp. dan *Sonneratia* sp., kemudian diikuti dengan percampuran *Rhizophora* sp. dan *Bruguier* asp. dengan spesies mangrove lainnya seperti *Exoecaria agalloch* dan *Xylocarpus* sp.
- 3) Vegetasi Mangrove Dewasa ditandai dengan pohon *Rhizophora* sp. dan *Bruguiera* sp. yang besar dan tinggi. Di bawah tajuk, terdapat semai dan juga ditemukan *Acrosticum aureum*, *Acanthus* sp., dan *Nypa fruticans*. Di lingkungan yang cocok, kedua spesies mangrove utama membentuk zona spesifik dengan tinggi 50-60 m.
- 4) Vegetasi Nipah terdiri dari spesies utama nipa (*Nypa fruticans*) yang tumbuh di dekat muara dan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Tidak ada vegetasi bawah, tetapi pada bagian transisi muncul jenis *Crinum* sp. dan *Hanjuang* Malayuna. Meskipun ada zonasi dalam vegetasi mangrove, namun pada kenyataannya, banyak formasi serta zona vegetasi yang tumpang tindih dan bercampur serta struktur dan korelasi yang terlihat di suatu daerah tidak selalu bisa diterapkan di daerah lain.

B. Penelitian terdahulu

Kajian pada penelitian terdahulu yang serupa memberikan manfaat bagi peneliti dijalankan agar pengetahuan dan wawasan bisa

¹⁷ Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni, *Hutan mangrove dan Pemanfaatannya*, 3.

diperluas serta menghindari pengulangan dari penelitian-penelitian yang sudah dijalankan sebelumnya oleh orang lain, ataupun untuk mempertahankan keaslian penelitian. Sejumlah penelitian sebelumnya yang sama dengan kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Indah Andayani, Maria Veronika dan Wiwin Yulianingsih pada tahun 2021 berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. Menurut hasil kajian, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM di Kabupaten Kediri dalam proses pemasaran produk. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang paling diperlukan bagi para pengusaha UMKM ialah pemberdayaan pemasaran produk secara online melalui platform pasar digital dan inovasi produk UMKM untuk beralih ke produk yang lebih dibutuhkan.

Persamaan dengan kajian ini ialah fokus penelitian pada strategi pemberdayaan masyarakat, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Adapun perbedaan dengan kajian ini ialah subyek penelitian yang dipilih, pada jurnal ini memilih pelaku UMKM sedangkan kajian ini ialah pengelola rumah edukasi mangrove. Perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Kediri sedangkan kajian ini memilih lokasi di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Penelitian Dinar Wahyuni pada tahun 2018 berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul”. Dari hasil kajian bisa disimpulkan jika Desa Wisata Nglanggeran menjalankan pemberdayaan masyarakat melalui tiga strategi, yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Proses penyadaran dijalankan dengan cara sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa hingga akhirnya Nglanggeran dijadikan sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dijalankan melalui pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen desa wisata. Sedangkan tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki kapasitas yang cukup sehingga bisa mencapai kemandirian.

Persamaan dengan kajian ini ialah fokus penelitian pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa dan jenis. Adapun perbedaan dengan kajian ini ialah potensi wisata yang dikaji yakni Perkebunan Kakao, pada kajian ini memilih ekowisata hutan mangrove. Perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian yang terletak di

Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul sedangkan kajian ini memilih lokasi di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

3. Penelitian Anisa Nur Andina pada tahun 2020 berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pandansari Kabupaten Brebes untuk Mengurangi Kemiskinan”. Pada kajian mengenai strategi pengembangan ekowisata hutan mangrove di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, telah ditemukan berbagai inovasi yang bisa membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil kajian tersebut terbukti efektif.

Persamaan dengan kajian ini ialah fokus penelitian pada strategi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekowisata hutan mangrove, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Adapun perbedaan dengan kajian ini ialah lokasi penelitian yang dipilih yakni di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes sedangkan kajian ini memilih lokasi di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

C. Karangka Bepikir

Kondisi Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak berupa daerah pesisir pantai yang tidak terawat, sampah dan kayu bekas berserakan memperlihatkan pengelolaan lingkungan yang tidak berhasil. Kondisi ini memerlukan solusi pemecahan masalah agar kondisi demikian tidak berlarut. Strategi pemberdayaan yang tepat diperlukan untuk mengubah masalah menjadi keuntungan. Penanaman hutan mangrove yang sesuai dengan kondisi geografis bisa menjadi potensi utama untuk meraih memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu cara pemanfaatan hutan mangrove ialah dengan menjadikannya sebagai tempat ekowisata. Pariwisata yang berbasis ekowisata ialah kegiatan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan memberikan prioritas pada konservasi alam, pengembangan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, dan peningkatan pendidikan. Ekowisata selain memberikan hiburan bagi masyarakat pun bisa pula menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan potensi hutan mangrove sebagai ekowisata tidak bisa dijalankan seketika, artinya memerlukan beberapa tahapan antara lain; penyadaran, pemetaan, perencanaan dan terakhir aksi. Kegiatan ini pun tidak bisa berjalan tanpa usaha dari pengelola ekowisata mangrove dan aparatur desa setempat. Sinergi pengelola dan aparatur desa akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk

berpartisipasi. Setelah kegiatan pemberdayaan ekowisata mangrove dengan pelibatan masyarakat dijalankan akan memberikan hasil yang bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat lokal.

Kerangka Berpikir pada penelitian secara sistematis disajikan seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

